



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1195, 2015

KEMEN-LHK. Rencana Strategis. Tahun 2015-2019.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.39/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMN Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Renstra 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015-2019

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I terkait

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

LAMPIRAN MATRIK RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (P1)								1,547.01	910.15	965.98	1,023.94	1,085.37	Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem
	Meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (S2.P1)												
		Sumbangan hutan konservasi pada devisa dan penerimaan negara (termasuk industri) meningkat setiap tahun											
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (S3.P1)												
		Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun											
Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (K1)								8.00	9.89	10.49	11.12	11.79	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam							8.00	9.89	10.49	11.12	11.79	
		a. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok (S3.P1.K1.IKK.a)	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen						
		b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K1.IKK.b)	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit						
		c. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K1.IKK.c)	521 Paket Data										
		d. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK (S3.P1.K1.IKK.d)	20 KPHK	50 KPHK	100 KPHK	100 KPHK	100 KPHK						
		e. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 dokumen PKS (S3.P1.K1.IKK.d)	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Pengelolaan Kawasan Konservasi (K2)														Direktorat Kawasan Konservasi
	1. Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru													
		a. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K2.IKK.a)	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit							
		b. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan (S3.P1.K2.IKK.b)	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen							
		c. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha (S3.P1.K2.IKK.c)	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha							
		d. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa per tahun (S3.P1.K2.IKK.d)	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		e. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK (S3.P1.K2.IKK.e)	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit							
		f. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha (S3.P1.K2.IKK.f)		25.000 hektar	50.000 hektar	75.000 hektar	100.000 hektar							
		g. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi (S3.P1.K2.IKK.g)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi							
		h. Kapasitas pengelola KPHK meningkat setiap tahun (S3.P1.K2.IKK.h)	20 KPHK	50 KPHK	100 KPHK	100 KPHK	100 KPHK							
Konservasi Spesies dan Genetik (K3)								25.18	16.24	17.21	18.25	19.34	Direktorat Konservasi Keekaragaman Hayati	
	1. Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan genetik													
		a. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 (S3.P1.K3.IKK.a)	2%	4%	6%	8%	10%							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 (S3.P1.K3.IKK.b)	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies						
		c. Jumlah unit penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan ke luar negeri bersertifikat sebanyak 50 Unit (S2.P1.K3.IKK.c)	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit						
		d. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp25 Trilyun (S2.P1.K3.IKK.b)	Rp5 T	Rp10 T	Rp15 T	Rp20 T	Rp25 T						
		e. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp50 M (S2.P1.K3.IKK.d)	Rp10 M	Rp20 M	Rp30 M	Rp40 M	Rp50 M						
		f. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah Biogeografi (sumatra, jawa-bali, kalimantan, nusa tenggara, sulawesi, maluku, dan papua) (S3.P1.K3.IKK.f)	7 Wilayah										
		g. Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC (S3.P1.K3.IKK.g)	1 PIC	3 PIC	5 PIC	7 PIC	10 PIC						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		h. Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekrayasa Genetik (S3.P1.K3.IKK.h)	4 Assesment	8 Assesment	12 Assesment	16 Assesment	20 Assesment						
		i. Terbentuknya dan beroperasinya sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional sebanyak 1 unit per tahun (S3.P1.K3.IKK.i)	10 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
		j. Jumlah pusat pengembangan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 Unit. (S3.P1.K3.IKK.j)	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit						
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)								19.99	9.06	10.82	11.47	12.16	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
	1. Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan							19.99	9.06	10.82	11.47	12.16	
		a. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun (S2.P1.K4.IKK.a)	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.150.000 Orang	1.500.000 Orang						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (K6)														Balai Konservasi Sumber Daya Alam
	1. Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan													
		a. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 210 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K6.IKK.a)		80 Unit KK	120 Unit KK	160 Unit KK	210 Unit KK							
		b. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK (S3.P1.K6.IKK.b)	20 KPHK	50 KPHK	100 KPHK	100 KPHK	100 KPHK							
		c. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen RP dan 150 Dokumen Zonasi/Blok (S3.P1.K6.IKK.c)	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen							
		d. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha (S3.P1.K6.IKK.d)		10.000 hektar	20.000 hektar	30.000 hektar	40.000 hektar							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		e. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun (S3.P1.K6.IKK.e)		27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa							
		f. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 471 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K6.IKK.f)		180 Unit KK	270 Unit KK	380 Unit KK	471 Unit KK							
		g. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha (S3.P1.K6.IKK.g)		25.000 hektar	50.000 hektar	75.000 hektar	100.000 hektar							
		h. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 471 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K6.IKK.h)		471 Paket Data	471 Paket Data	471 Paket Data	471 Paket Data							
		i. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi (S3.P1.K6.IKK.i)		34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi							
		j. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 (S3.P1.K6.IKK.j)	2%	4%	6%	8%	10%							
		k. Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembalikan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 (S3.P1.K6.IKK.k)	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		l. Jumlah unit penangkaran yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan ke luar negeri bersertifikat sebanyak 50 Unit (S2.P1.K6.IKK.l)	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit						
		m. Besaran PINBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp50 M (S2.P1.K6.IKK.m)	Rp10 M	Rp20 M	Rp30 M	Rp40 M	Rp50 M						
		n. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah Biogeografi (Sumatra, Jawa-bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua) (S3.P1.K6.IKK.n)	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah						
		o. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 Unit (S3.P1.K6.IKK.o)		6 Unit	9 Unit	12 Unit	15 Unit						
		p. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun (S2.P1.K6.IKK.p)	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.150.000 Orang	1.500.000 Orang						
		q. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun (S2.P1.K6.IKK.q)	3,5 Juta Orang	7,5 Juta Orang	11,5 Juta Orang	15,5 Juta Orang	20 Juta Orang						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		r. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 (S2.P1.K6.IKK.r)	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit						
		s. Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 25 Unit (S2.P1.K6.IKK.s)	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit						
		t. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak minimal 50 unit (S3.P1.K6.IKK.t)	5 Unit	15 unit	25 unit	35 unit	50 unit						
		u. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit (S2.P1.K6.IKK.u)		1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit						
		v. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang (S3.P1.K6.IKK.v)	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang						
		w. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P1.K6.IKK.w)	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin						
Pengelolaan Taman Nasional (K7)								775.83	368.50	390.61	414.05	438.89	Balai Taman Nasional
	1. Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional							775.83	368.50	390.61	414.05	438.89	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K7.IKK.a)	10 Unit KK	20 Unit KK	30 Unit KK	40 Unit KK	50 Unit KK						
		b. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen RP dan 150 Dokumen Zonasi/Blok (S3.P1.K7.IKK.b)	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen						
		c. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha (S3.P1.K7.IKK.c)	10.000 hektar	30.000 hektar	40.000 hektar	50.000 hektar	60.000 hektar						
		d. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun (S3.P1.K7.IKK.d)	50 Desa										
		e. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 50 TN di seluruh Indonesia (S3.P1.K7.IKK.e)	20 TN	20 TN	30 TN	40 TN	50 TN						
		f. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha (S3.P1.K7.IKK.f)	10.000 hektar	25.000 hektar	50.000 hektar	75.000 hektar	100.000 hektar						
		g. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 TN di seluruh Indonesia (S3.P1.K7.IKK.g)	50 Paket Data										

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		h. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi (S3.P1.K7.IKK.h)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		i. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 (S3.P1.K7.IKK.i)	2%	4%	6%	8%	10%						
		j. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah Biogeografi (sumatra, jawa-bali, kalimantan, nusa tenggara, sulawesi, maluku, dan papua) (S3.P1.K7.IKK.j)	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah						
		k. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbarung sebanyak 50 Unit (S3.P1.K7.IKK.k)	10 Unit	14 Unit	21 Unit	28 Unit	35 Unit						
		l. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun (S2.P1.K7.IKK.l)	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.150.000 Orang	1.500.000 Orang						
		m. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun (S2.P1.K7.IKK.m)	3,5 Juta Orang	7,5 Juta Orang	11,5 Juta Orang	15,5 Juta Orang	20 Juta Orang						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		n. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 (S2.P1.K7.IKK.n)	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit							
		o. Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 25 Unit (S2.P1.K7.IKK.o)	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit							
		p. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak minimal 50 unit (S2.P1.K7.IKK.p)	5 Unit	15 unit	25 unit	35 unit	50 unit							
		q. Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit kawasan konservasi (S3.P1.K7.IKK.q)	-	-	-	1 unit	2 unit							
		r. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang (S3.P1.K7.IKK.m)	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang							
		s. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P1.K7.IKK.m)	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (K8)								39.01	20.14	21.35	22.63	23.99	Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem							39.01	20.14	21.35	22.63	23.99	
		a. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (S3.P1.K8.IKK.a)	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin						
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)								1,088.27	1,831.90	881.75	934.66	990.74	Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
	Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan (S1.P2.1)												
		Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun											
	Kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun (S1.P2.2)												
		Kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P2.3)													
		Sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun												
	Meningkatkan daya dukung DAS serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW (S3.P2.3)													
		Kesehatan DAS prioritas serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW meningkat setiap tahun												
	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak (S3.P2.2)													
		Jumlah unit pengelolaan hutan lindung meningkat setiap tahun												
Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air (K1)								62.06	17.35	22.63	23.99	25.43	Direktorat Konservasi Tanah dan Air	
	1. Pulihnya Kesehatan DAS kritis							62.06	17.35	22.63	23.99	25.43		
		a. Jumlah lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (S1.P2.K1.IKK.a)	1,25 jt ha	2,5 jt ha	3,75 jt ha	5 jt ha	5,5 jt ha							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		b. Jumlah DAS prioritas yang melakukan pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu selama 5 tahun di 15 DAS prioritas (S3.P2.K7.IKK.b)	5 DAS	7 DAS	10 DAS	12 DAS	15 DAS							
		c. Tanaman Hutan Kota seluas 5.000 Ha (S1.P2.K1.IKK.c)		200 ha	3.000 ha	4.000 ha	5.000 ha							
		d. Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat menjasi 100 juta M3 di tahun 2019 (S3.P2.K1.IKK.d)	20 juta M3											
Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (K2)								6.25	3.50	3.71	3.93	4.17	Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	
	1. Meningkatnya Pengelolaan Hutan Lindung di tingkat tapak secara lestari							6.25	3.50	3.71	3.93	4.17		
		a. Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 Unit KPHL sampai dengan Tahun 2019 (S3.P2.2.K2.IKK.a)	40 KPHL	80 KPHL	120 KPHL	160 KPHL	182 KPHL							
		b. Kapasitas pengelola KPHL meningkat setiap tahun (S3.P2.2.K2.IKK.b)	40 KPHL	80 KPHL	120 KPHL	160 KPHL	182 KPHL							
Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS (K3)								7.12	8.50	9.01	9.55	10.12	Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS	
	1. Menurunnya Kekritisn DAS Prioritas							7.12	8.50	9.01	9.55	10.12		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		a. Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki NoU/Hatas sebanyak 19 DAS Lintas Negara (S3.P2.K3.IKK.a)	3 DAS	9 DAS	11 DAS	15 DAS	19 DAS							
		b. Jumlah DAS prioritas yang memiliki data dan Informasi penurunan Q_{max}/Q_{min} , kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S3.P2.K3.IKK.b)	5 DAS	7 DAS	10 DAS	12 DAS	15 DAS							
		c. Jumlah RPDAST yang di internalisasi ke dalam RTRW sebanyak 108 RDAST (S3.P2.K3.IKK.c)	20 RPDAST	40 RPDAST	60 RPDAST	80 RPDAST	108 RPDAST							
Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan (K4)								6.96	7.72	8.19	8.68	9.20	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	
	1. Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan							6.96	7.72	8.19	8.68	9.20		
		a. Luas sumber benih berkualitas yang dibangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.K4.IKK.a)	170 ha	250 ha	330 ha	410 ha	490 ha							
		b. Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan didistribusikan dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.K4.IKK.b)	37,5 jt bibit	75 jt bibit	112,5 jt bibit	150 jt bibit	187,5 jt bibit							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		c. Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2.K4.IKK.c)	10.500 ha											
Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K5)								23.40	72.80	25.00	27.00	30.00	Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	
	1. Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas													
		a. Jumlah segmen sungai serta mata air yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 15 DAS Prioritas (S3.P2.K5.1.IKK.a)		3 Sungai	6 Sungai	10 sungai	15 Sungai		50.80					
	2. Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 danau prioritas								22.00					
		a. Jumlah danau yang diturunkan laju sedimentasi atau erosinya pada 15 danau (S3.P2.K5.2.IKK.a)	1 danau	5 danau	9 danau	12 danau	15 danau							
		b. Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya pada 15 danau (S3.P2.K5.2.IKK.b)	1 danau	5 danau	9 danau	12 danau	15 danau							
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K6)								835.42	1,645.42	752.77	797.94	845.81	Balai Pengelolaan DAS	
	1. Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS								914.92	657.05	696.46	738.26		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		a. Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019 (S3.P2.K6.1.IKK.a)	40 KPHL	80 KPHL	120 KPHL	160 KPHL	182 KPHL							
		b. Luas Hutan Kota dan pemeliharannya seluas 5.000 Ha (S1.P2.K1.1.IKK.b)		200 ha	3.000 ha	4.000 ha	5.000 ha							
		c. Lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (S1.P2.K6.1.IKK.c)	1,25 jt ha	2,5 jt ha	3,75 jt ha	5 jt ha	5,5 jt ha							
		d. Jumlah RPDAST yang di Internalisasi ke dalam RTRW sebanyak 108 RDAST (S3.P2.K6.1.IKK.d)	20 RPDAST	40 RPDAST	60 RPDAST	80 RPDAST	108 RPDAST							
		e. Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara (S3.P2.K6.1.IKK.e)	3 DAS	7 DAS	11 DAS	15 DAS	19 DAS							
		f. Produksi dan distribusi bibit sebanyak 135 juta bibit berkualitas (S1.P2.K6.1.IKK.f)		54 jt bibit	81 jt bibit	108 jt bibit	135 jt bibit							
	2. Pulihnya Kesehatan DAS kritis								730.50	95.72	101.46	107.55		
		a. Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S3.P2.K6.2.IKK.a)	5 DAS	7 DAS	10 DAS	12 DAS	15 DAS							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		b. Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug di daerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S3.P2.K6.2.IKK.b)	5 DAS	7 DAS	10 DAS	12 DAS	15 DAS							
		c. Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan Informasi penurunan Qmax/Qmin, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S1.P2.K6.2.IKK.c)	5 DAS	7 DAS	10 DAS	12 DAS	15 DAS							
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (K7)								65.39	38.21	40.50	42.93	45.51	Balai Perbenihan Tanaman Hutan	
	1. Meningkatkan Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan							65.39	38.21	40.50	42.93	45.51		
		a. Luas sumber benih berkualitas yang terbangun melalui kebun benih semai/kebud benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.K7.IKK.a)	170 ha	250 ha	330 ha	410 ha	490 ha							
		b. Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan didistribusikan dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 52,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.K7.IKK.b)	37,5 jt bibit	21 jt bibit	31,5 jt bibit	42 jt bibit	52,5 jt bibit							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		c. Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2.K7.IKK.c)	10.500 ha											
Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Mangrove (K8)								13.34	6.70	7.10	7.53	7.98	Balai Pengelolaan Hutan Mangrove	
	1. Meningkatnya Pengelolaan Hutan Mangrove							13.34	6.70	7.10	7.53	7.98		
		a. Jumlah wilayah kerja yang memiliki ketersediaan data dan informasi pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.a)	2 wil kerja											
		b. Jumlah Provinsi yang mengaktifkan Kelompok kerja mangrove daerah sebanyak 31 Provinsi (S3.P2.K8.IKK.b)	31 prov											
		c. Jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.c)	2 wil kerja											
Penyelenggaraan Pengembangan Persuteraan Alam (K9)								9.20	4.20	4.45	4.72	5.00	Balai Pengembangan Persuteraan Alam	
	1. Meningkatnya Pengelolaan Persuteraan Alam							9.20	4.20	4.45	4.72	5.00		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		a. Persentase produksi HHBK sutera alam dari Hutan Lindung meningkat sampai dengan 15% dari tahun 2014 (S2.P2.K9.IKK.a)	3%	6%	9%	12%	15%							
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (K10)								59.13	27.50	29.68	31.46	33.35	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung							59.13	27.50	29.68	31.46	33.35		
		a. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKDASHL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P2.K10.IKK.a)	70 poin	72 poin	74 poin	76 poin	78 poin							
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (P3)								570.45	511.30	827.26	1,204.81	1,692.12	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	
	Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi (S1.P3)													
		Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun												

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P3)												
		Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun											
	Meningkatnya pengelolaan hutan Produksi di tingkat tapak secara lestari (S3.P3)	Jumlah unit pengelolaan hutan meningkat setiap tahun											
		Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikasi PHPL meningkat setiap tahun											
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi (K1)								10.66	9.56	10.51	11.56	12.72	Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi
	1. Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi							10.66	9.56	10.51	11.56	12.72	
		a. Jumlah KPHP yang beroperasi di Hutan Produksi sebanyak 347 KPHP (S3.P3.K1.IKK.a)		149 KPHP	209 KPHP	269 KPHP	347 KPHP						
		b. Jumlah provinsi yang memiliki arahan pemanfaatan dan investasi di Hutan Produksi yang belum dibebani izin di 27 provinsi (S3.P3.K1.IKK.b)		27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		c. Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP (S3.P3.K1.IKK.c)		3 KPHP	5 KPHP	5 KPHP	5 KPHP						
		d. Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di Hutan Produksi sebanyak 35 unit (S3.P3.K1.IKK.d)		6 Unit	8 Unit	8 Unit	7 Unit						
		e. Kapasitas pengelola KPHP meningkat setiap tahun (S3.P3.K1.IKK.e)		149 KPHP	209 KPHP	269 KPHP	347 KPHP						
Peningkatan Usaha Hutan Produksi (K2)								37.74	20.27	22.29	24.52	26.97	Direktorat Usaha Hutan Produksi
	1. Meningkatnya Kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman							37.74	20.27	22.29	24.52	26.97	
		a. Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam sebesar 29 Juta M3 selama 5 Tahun (S2.P3.K2.1.IKK.a)		5,7 Jt M3	5,8 Jt M3	5,9 Jt M3	6 Jt M3						
		b. Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman sebesar 160 Juta M3 selama 5 Tahun (S2.P3.K2.1.IKK.a)		32 Jt M3	33 Jt M3	34 Jt M3	35 Jt M3						
		c. Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 100.000 Ha (S1.P3.K2.1.IKK.b)		20 Ribu Ha	20 Ribu Ha	20 Ribu Ha	20 Ribu Ha						
		d. Luas hutan di Kalimantan yang dibangun dengan silvokultur intensif seluas 11.000 ha (S2.P3.K2.1.IKK.c)		2.000 Ha	4.000 Ha	8.000 Ha	11.000 Ha						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	2. Seluruh UPHHK-HA dan HT aktif beroperasi pada tahun 2019	a. Jumlah unit UPHHK HA yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 220 unit hingga tahun 2019 (S2.P3.K2.2.IKK.a)		188 Unit	199 Unit	210 Unit	220 Unit							
		b. Jumlah unit UPHHK-HT yang kinerja usaha pemanfaatannya menjadi "Layak Dilanjutkan (LD)" bertambah sebanyak 175 unit hingga Tahun 2019 (S2.P3.K2.2.IKK.b)		34 Unit	36 Unit	36 Unit	37 Unit							
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK (K3)								5.86	5.76	6.33	6.97	7.66	Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi	
	1. Meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi usaha jasa lingkungan							5.86	5.76	6.33	6.97	7.66		
		a. Jumlah unit usaha jasa lingkungan/pemanfaatan air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9 Unit (S2.P3.K3.IKK.a)		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit							
		b. Jumlah Produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 Tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 225.000 ton (S2.P3.K3.IKK.b)		243.000 Ton	252.000 Ton	261.000 Ton	270.000 Ton							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		c. Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem meningkat di Tahun 2019 seluas 500.000 Ha (S1.P3.K3.IKK.c)		100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha						
Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan (K4)								8.49	13.43	14.77	16.25	17.87	Direktorat Iuran dan Penedaran Hasil Hutan Kayu
	1. Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan							8.49	13.43	14.77	16.25	17.87	
		a. Jumlah PNPB dari Investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp.2,365 Trilyun selama 5 tahun (S2.P3.K4.IKK.a)		Rp.2,719 T	Rp.2,796 T	Rp.2,958 T	Rp.3,127 T						
		b. Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan Iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 175 unit (S2.P3.K4.IKK.b)		145 Unit	155 Unit	165 Unit	175 Unit						
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan (K5)								16.00	14.81	16.29	17.92	19.72	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	1. Meningkatnya Investasi dan ekspor produk industri kehutanan							16.00	14.81	16.29	17.92	19.72	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		a. Jumlah nilai investasi industri kehutanan meningkat sebesar Rp.2,7 Triliun selama 5 Tahun (S2.P3.K5.IKK.a)		Rp.540 M	Rp.540 M	Rp.540 M	Rp.540 M							
		b. Jumlah Forest Based Cluster Industry yang terbentuk sebanyak 15 Unit (S2.P3.K5.IKK.b)		2 Unit	4 Unit	4 Unit	3 Unit							
		c. Nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar USD40,37 miliar selama 5 tahun (S2.P3.K5.IKK.b)		USD 7,47 M	USD 8,03 M	USD 8,64 M	USD 9,28 M							
		d. Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 25,5 Juta M3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu (S2.P3.K5.IKK.c)		28,4 Juta M3	29,2 Juta M3	30,0 Juta M3	30,8 Juta M3							
		e. Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku online meningkat sebesar 50% dari jumlah tahun 2014 sebesar 784 Unit (S2.P3.K5.IKK.d)		940 Unit	1.018 Unit	1.096 Unit	1.174 Unit							
Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan (K6)								440.87	428.95	736.67	1.105.16	1.582.51		Balai Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan
	1. Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan							440.87	428.95	736.67	1.105.16	1.582.51		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		a. Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP (S3.P3.K6.IKK.a)		149 Unit	209 Unit	269 Unit	347 Unit							
		b. Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi hutan produksi sebanyak 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.b)		18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah							
		c. Jumlah wilayah yang Produksi dan Kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan meningkat di 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.c)		18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah							
		d. Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan di 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.d)		18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah							
		e. Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi industri primer hasil hutan di 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.e)		18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah							
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (K7)								50.83	18.53	20.38	22.42	24.67		Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
	1. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari							50.83	18.53	20.38	22.42	24.67		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78 (A) (S2.P3.K7.IKK.a)		72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin							
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (P4)								308.16	299.76	329.73	362.70	398.97	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	
	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (S3.P4.1)													
		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun												
	Meningkatnya upaya penyelesaian konflik dan tenurial di kawasan hutan (S3.P4.2)													
		Luas hutan yang diselesaikan konfliknya meningkat setiap tahun												
	Meningkatnya Perilaku Peduli Lingkungan dan Kehutanan (S3.P4.3)													
		Jumlah role model peduli lingkungan hidup dan kehutanan meningkat setiap tahun												

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (K1)								51.55	68.10	23.10	24.20	23.20	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
	1. Meningkatnya luas areal kelola masyarakat			5.080.000 ha	7.620.000 Ha	10.160.000 Ha	12.700.000 Ha						
		a. Luas hutan yang di kelola masyarakat menjadi 12,7 juta HA dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan (S3.P4.K1.IKK.a)		5.080.000 ha	7.620.000 Ha	10.160.000 Ha	12.700.000 Ha						
		b. Tersedianya regulasi hak dan akses masyarakat atas hutan dan pasar (S3.P4.1.K1.IKK.b)			1 Paket								
		c. Proporsi kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat meningkat setiap setahun (S3.P4.1.K1.IKK.c)	0.18%	4.23%	6.35%	8.47%	10.58%						
		d. Luas pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry pada kegiatan HD, HKm, HTR, HR seluas 250.000 ha (S3.P4.1.K1.IKK.d)		50.000 ha	100.000 ha	200.000 ha	250.000 ha						
Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (K2)								86.34	100.60	25.40	26.60	25.50	Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
	1. Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan			2.000 kelompok	3.000 kelompok	4.000 kelompok	5.000 kelompok						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		a. Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 5.000 kelompok (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) (S3.P4.K2.IKK.a)		2.000 kelompok	3.000 kelompok	4.000 kelompok	5.000 kelompok							
Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat (K3)								7.95	23.72	28.80	30.20	29.00	Direktorat Kemitraan Lingkungan	
	1. Meningkatkan role model komunitas yang berperan serta dalam penyelamatan SDA dan ekosistem serta LHK			850 komunitas dan 88.000 orang	1400 komunitas dan 13.200 orang	1950 komunitas dan 21.800 orang	2500 komunitas dan 22.000 orang		23.72					
		a. Jumlah komunitas penyelamat SDA & Lingkungan pada kawasan DAS, Danau/Mata Air, Karst, Rawan, Gambut, Pesisir, Laut, & Pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri & pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi. (S3.P4.K3.IKK.a)		850 komunitas dan 88.000 orang	1400 komunitas dan 13.200 orang	1950 komunitas dan 21.800 orang	2500 komunitas dan 22.000 orang							
		b. Jumlah unit jejaring dan mitra (ormas, dunia usaha, perguruan tinggi, legislator melalui kaukus LHK dan lembaga lain) yang berperan serta dalam membangun komunitas penyelamatan SDA dan ekosistem serta LHK. (S3.P4.K3.IKK.b)		80 jejaring dan mitra	120 jejaring dan mitra	160 jejaring dan mitra	200 jejaring dan mitra							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		c. Jumlah unit kanal komunikasi yang dibangun untuk meningkatkan akses informasi dan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (S3.P4.K3.IKK.c)		110 kanal komunikasi	160 kanal komunikasi	210 kanal komunikasi	260 kanal komunikasi							
		d. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang (S3.P4.K3.IKK.d)		2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang							
		e. Luas kawasan hutan yang dikembangkan melalui kemitraan/kerjasama pemerintah swasta (KPS) dengan format baru CSR seluas 1,6 juta ha (S3.P4.K3.IKK.e)		400.000 ha	800.000 ha	1,2 juta ha	1,6 juta ha							
Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat (K4)								14.36	32.40	40.30	42.30	40.60	Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	
	1. Meningkatnya penyelesaian konflik bidang lingkungan hidup dan kemitraan			5.080.000 ha	7.620.000 Ha	10.160.000 Ha	12.700.000 Ha							
		a. Luasan area konflik yang terselesaikan dalam kaitannya dengan pengelolaan HTR, HKm, HD, HR, dan Kemitraan sampai dengan tahun 2019 seluas 12,7 ha (S3.P4.K4.IKK.a)		5.080.000 ha	7.620.000 Ha	10.160.000 Ha	12.700.000 Ha							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		b. Seluruh hutan adat diidentifikasi, dipetakan dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat (S3.P4.K4.IKK.b)		25%	50%	75%	100%							
		c. Tersedianya Standar Operasi penanganan konflik (S3.P4.K4.IKK.c)		1 NSPK										
		d. Jumlah konflik di kawasan hutan turun setiap tahun (S3.P4.K4.IKK.d)		25%	50%	75%	100%							
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (KS)								147.96	28.10	11.50	12.10	11.60		Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
	1. Tenujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PSKL			72 poin	74 poin	76 poin	78 poin							
		a. SAKIP Ditjen PSKL dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019 (S3.P4.K5.IKK.a)		72 poin	74 poin	76 poin	78 poin							
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (PS)								444.45	316.90	348.59	366.02	384.32		
	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan (S2.P5), (S3.P5)													

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Perencanaan dan Pengembangan SDM (K1)								57.11	66.00	72.60	76.23	80.04		Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1. Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten			1,900	5,600	6,100	6,364	57.11	66.00	72.60	76.23	80.04		
		a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang (S3.P5.K1.IKK.b)		300	3,500	3,500	3,264							
		b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 orang (S3.P5.K1.IKK.b)		1,600	2,100	2,600	3,100							
Penyelenggaraan Didlat Aparatur LHK (K2)								210.59	101.41	111.55	117.13	122.99		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1. Meningkatnya kapasitas SDM LHK			8,172	11,577	11,777	11,746	210.59	101.41	111.55	117.13	122.99		
		a. Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 35.000 orang (S3.P5.K2.IKK.a)		7,000	7,000	7,000	7,000							
		b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 340 orang (S3.P5.K2.IKK.b)		70	75	75	75							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kedidatan, 7 unit KHDTK (S3.P5.K2.IKK.c)		2	2	2	7							
		d. Jumlah tenaga balti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 15.000 orang (S3.P5.K2.IKK.d)		300	3.500	3.500	3.264							
		e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa - desa hutan meningkat kapasitasnya 5.000 orang (S3.P5.K2.IKK.e)		800	1.000	1.200	1.400							
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)								60.36	77.45	85.20	89.46	93.93	Sekolah Menengah Kehutanan	
	1. Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan			700	420	450	450	60.36	77.45	85.20	89.46	93.93		
		a. Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 2.300 orang (S3.P5.K3.IKK.a)		700	420	450	450							
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup(K4)								23.75	16.37	18.01	18.91	19.86	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	
	1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan			12.560	14.140	17.920	20.600	23.75	16.37	18.01	18.91	19.86		
		a. Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 11.200 orang (S3.P5.K4.IKK.a)		1.760	2.240	2.720	3.200							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 10.000 orang (S3.P5.K4.IKK.b)		2.000	2.000	2.000	2.000						
		c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adwiyata), 5.000 unit sekolah/kampus (S3.P5.K4.IKK.c)		800	900	1.200	1.400						
		d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 50.000 orang (S3.P5.K4.IKK.d)		8.000	9.000	12.000	14.000						
Peningkatan Penyuluhan (K5)								29.58	27.99	30.79	32.33	33.94	Pusat Penyuluhan
	1. Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat			2.052	2.270	2.380	2.690	29.58	27.99	30.79	32.33	33.94	
		a. Jumlah kelas kelompok tani desa - desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH (S3.P5.K5.IKK.a)		1.100	1.100	1.000	1.100						
		b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 500 unit (S2.P5.K5.IKK.b)		105	120	120	130						
		c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 250 unit (S3.P5.K5.IKK.c)		47	50	60	60						
		d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa - desa hutan, 5.000 orang (S3.P5.K5.IKK.d)		800	1.000	1.200	1.400						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (K6)								63.06	27.67	30.44	31.96	33.56	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM			81	82	83	84	63.06	27.67	30.44	31.96	33.56	
		a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A) (S3.P5.K6.IKK.a)		81	82	83	84						
Program Pengendalian Perubahan Iklim (P6)								153.48	150.10	172.34	202.50	227.56	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
	Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (S1.P6.1)												
		Penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan, gambut dan limbah sebesar 21,7%											
	Menurunnya luas areal kebakaran hutan (S3.P6.1)												
		Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim (S3.P6.2)												
		Jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim meningkat setiap tahun											
Adaptasi Perubahan Iklim (K1)								6.44	7.85	11.98	13.77	15.84	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
	1. Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di 15 wilayah			5 Wilayah	10 Wilayah	15 Wilayah	15 Wilayah	6.44	7.85				
		a. Jumlah wilayah yang difasilitasi pengembangan skenario iklim sebanyak 15 wilayah (S1.P6.K1.IKK.a)		5 Wilayah	10 Wilayah	15 Wilayah	15 Wilayah						
		b. Jumlah wilayah yang difasilitasi dalam pengembangan (downscaling) rencana aksi adaptasi perubahan iklim di daerah sebanyak 15 wilayah (S1.P6.K1.IKK.b)		5 Wilayah	10 Wilayah	15 Wilayah	15 Wilayah						
		c. Jumlah wilayah yang difasilitasi dalam pengembangan adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem di 15 wilayah rentan (S1.P6.K1.IKK.c)		2 wilayah	5 wilayah	10 Wilayah	15 Wilayah						
		d. Pengembangan dan Operationalisasi SIDIK yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas (S1.P6.K1.IKK.d)		100% Data sosek	100% Data sosek dan data iklim	2 sektor prioritas	4 sektor prioritas						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		e. Fasilitas inisiatif lokal adaptasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim) sebanyak 2000 Desa (S1.P6.K1.IKK.e)		200 Desa	1.000 Desa	1.500 Desa	2.000 Desa							
Mitigasi Perubahan Iklim (K2)								19.09	9.36	10.76	13.50	14.23	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	
	1. Ketersediaan kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim di bidang kehutanan, lahan gambut, dan limbah			5	7	7	7	19.09	5.80	6.67	8.80	8.82		
		a. Jumlah kebijakan yang termutakhirkan dalam penurunan emisi GRK di bidang kehutanan, lahan gambut, dan limbah (S1.P6.K2.1.IKK.a)		2 kebijakan	2 kebijakan	review 2 kebijakan	review 2 kebijakan							
		b. Jumlah perangkat mitigasi perubahan iklim yang termutakhirkan di bidang kehutanan dan lahan gambut: baseline, faktor emisi, data aktivitas, skenario mitigasi, safeguards (S1.P6.K2.1.IKK.b)		3 perangkat	5 Perangkat	5 Perangkat	5 Perangkat							
		c. Jumlah provinsi yang menerapkan RAD-GRK di bidang kehutanan dan lahan gambut (S1.P6.K2.1.IKK.c)		16 provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi							
	2. Penurunan konsumsi bahan perusak ozon			141.36	188.47	235.59	282.71		3.56	4.09	4.70	5.41		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Persentase tingkat penurunan konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC dari 403,9 ODP ton tahun 2013 menjadi 382,71 ODP ton atau 30% (S1.P6.K2.2.IKK.a)		15%	20%	25%	30%						
Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (K3)								4.00	8.88	6.72	11.22	8.89	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi
	1. Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK, serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan secara berkala setiap tahun			3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	4.00	8.88	6.72	11.22	8.89	
		a. Jumlah laporan hasil inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (S1.P6.K3.IKK.a)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
		b. Jumlah laporan Komunikasi nasional perubahan iklim (S1.P6.K3.IKK.b)		1 Dokumen Laporan Third National Communication	1 Dokumen Laporan BUR ke-2		1 Dokumen Laporan BUR ke-3						
		c. Jumlah bidang mitigasi yang ter Measurement Reporting and Verification (MRV) (S1.P6.K3.IKK.c)		5 bidang	5 bidang	5 bidang	5 bidang						
		d. Jumlah bidang aksi mitigasi yang terdaftar dalam Sistem Registry Nasional (S1.P6.K3.IKK.d)		5 bidang	5 bidang	5 bidang	5 bidang						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan Mobilisasi Sumber Daya untuk perubahan iklim (K4)								6.50	9.11	10.75	12.05	13.86	Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional
	1. Meningkatnya ketersediaan pendanaan dan kapasitas pengembangan sains perubahan iklim dan teknologi rendah karbon, sebesar 60% dari kebutuhan dengan baseline 2015			18%	38%	48%	60%	6.50	9.11	10.75	12.05	13.86	
		a. Diterapkannya mekanisme pengembangan manfaat dan penanganan deforestasi dan degradasi hutan di 25 lokasi (S1.P6.K4.IKK.a)		Mekanis me Benefit sharing terberbentu k	13 Lokasi	18 Lokasi	25 Lokasi						
		b. Jumlah kerjasama dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya terkait perdagangan carbon, teknologi rendah karbon dan Sains perubahan iklim sebanyak 15 kerja sama (S1.P6.K4.IKK.b)		6 Kerjasama	9 Kerjasama	12 Kerjasama	15 kerjasama						
		c. Jumlah kegiatan/proyek yang mendapat rekomendasi teknis untuk investasi penurunann emisi GRK di bidang energi, dan limbah sebanyak 200 yang akan dibiayai melalui pusat pembiayaan pembangunan hutan dan lingkungan (S1.P6.K4.IKK.c)		35 Keg.	75 Keg.	150 Keg	200 Keg						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		d. Persentase Posisi Indonesia dalam perjanjian dan forum internasional bidang perubahan iklim diterima sebesar 80% per tahun (S1.P6.K4.IKK.d)		80%	90%	80%	80%							
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (K5)								111.04	108.60	124.89	143.62	165.17	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	
	1. Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian karhutla							111.04	108.60	124.89	143.62	165.17		
		a. Presentase penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 10% dari batas toleransi maksimum jumlah hotspot sebesar 32.323 HS menjadi 29.091 HS pada tahun 2019 (S1.P6.K5.IKK.a)		4%	6%	8%	10%							
		b. Presentase penurunan luas kebakaran hutan non konservasi, dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 10% dari batas toleransi maksimum luas kebakaran hutan dan lahan seluas 498.736 Ha menjadi 448.863 Ha pada tahun 2019 (S1.P6.K5.IKK.b)		4%	6%	8%	10%							
		c. Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Manggala Agni dan MPA) sebanyak 5.000 Orang (S1.P6.K5.IKK.c)		2.000 orang	3.000 orang	4.000 orang	5.000 orang							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		d. Jumlah brigade Pengendalian Kebakaran Hutan pada kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang difasilitasi pembentukannya di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 50 Brigade (S1.P6.K5.IKK.d)		30 Brigade	40 Brigade	45 Brigade	50 Brigade							
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (K6)								6.41	6.30	7.25	8.33	9.58	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPI			72	74	76	78	6.41	6.30					
		a. SAKIP Ditjen PPI dengan nilai minimal 78 (A) di tahun 2019 (S1.P6.K6.IKK.a)		72	74	76	78							
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7)								212.43	246.31				Direktorat Jenderal Pengawasan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya keamanan lingkungan hidup dan kehutanan melalui penegakan hukum (S1.P7) dan (S3.P7)													
		Persentase pelanggaran hukum yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan kehutanan menurun setiap tahun												

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (K1)								96.54	36.30				Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
	1. Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; kepatuhan terhadap sanksi administrasi.			50%	50,6%	56,67%	58,3%	96.54	36.30				
		a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (S1.P6.K1.IKK.a)	100%	100%	100%	100%	100%						
		b. Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi kepatuhannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH sebesar 100% per tahun dari izin yang diterbitkan oleh KLH (S1.P6.K1.IKK.b)	100%	100%	100%	100%	100%						
		c. Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan meningkat tiap tahun (S1.P6.K1.IKK.c)	60%	60%	75%	85%	90%						
		d. Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum sebanyak 120 PPLH per tahun (S1.P6.K1.IKK.d)	120 PPLH										

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		e. Jumlah Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 100 orang PPLH (S1.P6.K1.IKK.e)	100 orang PPLH											
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) (K2)								15.55	16.85					Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
	1. Meningkatnya efektivitas PSLH		75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	15.55	16.85									
		a. Persentase PSLH di luar pengadilan sebesar 75% per tahun dari jumlah sengketa lingkungan hidup yang terjadi (S1.P7.K2.IKK.a)	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi											
		b. Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal sebanyak 10 gugatan per tahun (S1.P7.K2.IKK.b)	10 gugatan											
Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K3)								26.65	53.31					Direktorat Penegakan Hukum Pidana
	1. Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan		75%	75%	75%	75%	75%	26.65	53.31					

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		a. Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 sebesar 75% per tahun dari jumlah kasus (S1.P7.K3.IKK.a)	75%	75%	75%	75%	75%							
		b. Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan per tahun (S1.P7.K3.IKK.b)	200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan											
		c. Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani (S1.P7.K3.IKK.c)	100%	100%	100%	100%	100%							
		d. Jumlah pelaksanaan ekaminasi kasus TPLH sebesar 100% (S1.P7.K3.IKK.d)	100%	100%	100%	100%	100%							
		e. Fasilitasi penegakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terpadu sebanyak 100% per tahun (S1.P7.K3.IKK.e)	100%	100%	100%	100%	100%							
		f. Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang/tahun (S1.P7.K3.IKK.f)	500 orang											
		h. Persentase penurunan kasus penyelundupan limbah B3 dan limbah B3 ilegal lintas batas minimal 75% (S1.P7.K3.IKK.g)		20%	35%	55%	75%							
		i. Persentase penurunan kasus pembuangan dan dumping B3 dan limbah B3 ilegal ke laut minimal 75% (S1.P7.K3.IKK.g)		20%	35%	55%	75%							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan (K4)								50.84	128.85				Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
	1. Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Propinsi		77 lokasi	50.84	128.85								
		a. Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 lokasi utamanya di 15 DAS prioritas (S3.P7.K4.IKK.a)	77 lokasi										
		b. Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.b)	2.500 orang										
		c. Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya yang terbina sebanyak 34 unit dalam 5 tahun (S3.P7.K4.IKK.c)	34 unit MMP/TPHL/LSM/Mitra										
		d. Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum di 11 Brigade SPORC (S3.P7.K4.IKK.d)	11 Brigade										

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		e. Luas kawasan hutan yang dapat diindungi dari kegiatan ilegal meningkat setiap tahun (S3.P7.K4.IKK.e)	20%	40%	60%	80%	100%						
		f. Tersedianya regulasi penanganan pengaduan dan sertifikasi penegakan hukum (S3.P7.K4.IKK.f)	20%	40%	60%	80%	100%						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (K5)								22.86	11.00				Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1. Tenujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin		11.00				
		a. SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P7.K5.IKK.a)	70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin						
Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8)								389.81	206.80	472.00	516.00	566.50	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK (S1.P8.1),(S2.P8)dan (S3.P8)													
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan (K1)								40.67	36.00	83.20	98.50	113.00		Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan
	1. Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Konservasi Sumber Daya Alam; Produktivitas hutan; Hasil Hutan sebagai alternatif sumber pangan, energi dan obat-obatan		20%	40%	60%	80%	100%		20.50	66.00	79.50	93.00		
		a. Jumlah rancangan dan pengelolaan stasiun riset Kehati terintegrasi pada 12 TN serta pengelolaan 4 KHDTK (S3.P8.K1.1.IKK.a)	3 TN - 4 KHDTK	6 TN - 4 KHDTK	8 TN - 4 KHDTK	10 TN - 4 KHDTK	12 TN - 4 KHDTK							
		b. Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK; Konservasi Keanekaragaman Hayati; Konservasi Sumber Daya Air; Peningkatan Produktivitas Hutan (Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu); Sumber Pangan Alternatif dari Hutan; Sumber Energi; Obat-obatan Tanaman Hutan (6 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan) (S2.P8.K1.1.IKK.b)	6 Sintesa IPTEK; 40%	6 Sintesa IPTEK; 40%	6 Sintesa IPTEK; 50%	6 Sintesa IPTEK; 60%	6 Sintesa IPTEK; 70%							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	2. Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Pengelolaan Hutan		20%	40%	60%	80%	100%		15.50	17.20	19.00	20.00		
		a. Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (5 Pilot Iptek di KPH dan 1 Paket Pengembangan Iptek) (S3.P8.K1.2.IKK.a)	20%	40%	60%	80%	100%							
Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan (K2)								28.14	14.40	39.00	45.50	51.00		Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
	1. Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan		20%	40%	60%	80%	100%		10.40	34.00	38.50	43.00		
		a. Jumlah capaian IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK; revisiliasi pemanfaatan energi, pangan dan obat-obatan alternative dari hutan; pengolahan hasil hutan; dan keteknikan hutan (3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan) (S2.P8.K2.1.IKK.a)	3 Sintesa IPTEK; 20%	3 Sintesa IPTEK; 40%	3 Sintesa IPTEK; 50%	3 Sintesa IPTEK; 60%	3 Sintesa IPTEK; 70%							
	2. Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan		20%	40%	60%	80%	100%		4.00	5.00	7.00	8.00		
		a. Jumlah capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Pilot Iptek di KPH dan 1 Paket Pengembangan Iptek) (S2.P8.K2.2.IKK.a)	20%	40%	60%	80%	100%							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (K3)								27.12	21.66	48.40	55.50	68.50	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan
	1. Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Kualitas Lingkungan		20%	40%	60%	80%	100%		8.20	21.50	23.50	30.50	
		a. Jumlah capaian paket IPTEK dan persen pemanfaatan IPTEK: Kualitas Lingkungan (air, tanah, udara dan kebisingan) untuk IKLH; Kualitas Lingkungan untuk indeks pembangunan berkelanjutan; dan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian dimanfaatkan) (S1.P8.K3.1.IKK.a)	3 Sintesa IPTEK; 20%	3 Sintesa IPTEK; 40%	3 Sintesa IPTEK; 50%	3 Sintesa IPTEK; 60%	3 Sintesa IPTEK; 70%						
	2. Pengelolaan Laboratorium Rujukan Nasional		20%	40%	60%	80%	100%		11.96	24.50	28.00	32.00	
		a. Jumlah pengelolaan laboratorium rujukan (pengembangan metode pengujian kualitas lingkungan dan metodologi lingkungan) (S1.P8.K3.2.IKK.a)	1	1	1	1	1						
		b. Peningkatan kapasitas pengembangan laboratorium lingkungan di daerah pada 15 provinsi (S1.P8.K3.2.IKK.B)	5	5	10	10	15						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	3. Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Kualitas Lingkungan		20%	40%	60%	80%	100%		1.50	2.40	4.00	6.00	
		a. Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Paket Pengembangan Iptek) (S1.P8.K3.3.IKK.a)		25%	50%	75%	100%						
Penelitian dan Pengembangan Sosejak dan Perubahan Iklim (K4)								20.83	15.60	34.40	43.00	55.00	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim
	1. Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Sosejak dan Perubahan Iklim		20%	40%	60%	80%	100%		8.50	24.00	30.00	40.00	
		a. Jumlah capaian paket IPTEK dan persen pemanfaatan IPTEK Sosejak dan Perubahan Iklim: Sosek, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat dan resolusi konflik kawasan hutan; Keekonomian dan daya saing industri serta Kebijakan Tata Kelola LHK; Politik dan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian dimanfaatkan)(S1.P8.K4.1.IKK.a)	3 Sintesa IPTEK; 20%	3 Sintesa IPTEK; 40%	3 Sintesa IPTEK; 50%	3 Sintesa IPTEK; 60%	3 Sintesa IPTEK; 70%						
	2. Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim		20%	40%	60%	80%	100%		7.10	10.40	13.00	15.00	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		a. Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang LHK (5 Paket Rekomendasi) (S1.P8.K4.2.IKK.a)	1 Paket	2 Paket	3 Paket	4 Paket	5 Paket							
		b. Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Pilot Iptek di KPH, 1 Paket Pengembangan Iptek, serta Demonstration Activity di 10 ekosistem) (S1.P8.K5.1.IKK.b)	20%	40%	60%	80%	100%							
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (K5)														
	1. Tersedianya bahan sintesa hasil Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah		20%	40%	60%	80%	100%	188.37	104.54	102.30	232.50	236.00		Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
		a. Jumlah bahan sintesa Hasil Penelitian Terintegrasi di Seluruh Satker Balai Besar/ Balai (75 paket) (S3.P8.K5.IKK.a)	15	30	45	60	75							
		b. Persen capaian IPTEK Litbang Unggulan Daerah di Seluruh Satker Balai Besar/ Balai (15 IPTEK) (S3.P8.K5.IKK.b)	20%	40%	60%	80%	100%							
		c. Jumlah Pengelolaan KHDTK di masing-masing unit Litbang LHK di Daerah (30 KHDTK) (S3.P8.K5.IKK.c)	30	30	30	30	30							
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (K6)								84.67	14.60	40.00	41.00	43.00		Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	1. Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Program dan Kerjasama; Evaluasi dan Diseminasi; Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana/Prasarana dan Perengkapan; serta Pengelolaan Kepegawaian dan Penguatan Hukum serta Organisasi Tata Laksana pada Badan Litbang LHK (Setbadan, 4 Pusat/Pusbang, 15 Satker Daerah)		76	78	80	82	83	84.67	14.60	40.00	41.00	43.00		
		a. Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai > 82,00 (memuaskan) di tahun 2019 (S3.P8.K6.IKK.a)	76	78	80	82	83							
Program Planologi dan Tata Lingkungan (P9)		510,525,297						510.53	461.40	481.35	505.34	486.48		Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan
	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1)	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan												
	Tersedianya Data dan Informasi SDH (S3.P9.2)	Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi												
	Terlindungnya Penggunaan Kawasan Hutan (S3.P9.3)													

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi dan Air 100 %												
	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (S3.P9.4)													
		Terlaksananya seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan												
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (K1)								12.53	14.5	15.0	15.7	15.1	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
	1. Terelesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan								14.5					
		a. Persentase Kawasan Hutan yang ditetapkan sebesar 80% Kawasan Hutan (Kawasan Hutan yang telah ditetapkan s.d. Tahun 2014 mencapai 56%) (S3.P9.1.K1.IKK.a)		10%	5%	10%	10%							
		b. Seluruh Permohonan Perubahan Fungsi/Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial dapat diselesaikan (S3.P9.1.K1.IKK.b)		100%	100%	100%	100%							
		c. Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan (S3.P9.1.K1.IKK.c)	20%	40%	60%	80%	100%							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		d. Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk pencetakan sawah baru seluas 1 juta ha (S3.P9.1.K1.IKK.d)		1 juta ha										
		e. Luas kawasan hutan untuk pengembangan pertanian hasil reforma agraria seluas 4,1 juta ha (S3.P9.1.K1.IKK.e)		4,1 juta ha										
Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (K2)								11.14	12	23.1	24.2	23.2	Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	
	1. Data dan informasi SDH yang terberukan di seluruh KPH								12					
		a. Jumlah KPH yang telah memiliki Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan (S3.P9.2.K2.IKK.a)		358 KPH	458 KPH	600 KPH	600 KPH			12				
		b. Tersedianya regulasi satu peta di lingkungan Kementerian (S3.P9.2.K2.IKK.b)		100%										
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (K3)								53.79	23	23.1	24.2	23.2	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
	1. Pembentukan 459 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Propinsi								18.1					
		a. Jumlah provinsi yang memiliki Peta Arah Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 Provinsi (S3.P9.3.K3.1.IKK.a)		34 Prov (Update)	34 Prov (Update)	34 Prov (Update)	34 Prov (Update)							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		b. Jumlah KPH yang memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (S3.P9.3.K3.1.IKK.b)		209 KPH	309 KPH	409 KPH	409 KPH							
		c. Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKT dan RKT (S3.P9.3.K3.1.IKK.c)		358 KPH	458 KPH	600 KPH	600 KPH (Update)							
		d. Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK (S3.P9.3.K3.1.IKK.d)		358 KPH	458 KPH	600 KPH	600 KPH (Update)							
		e. Tersedianya regulasi penataan ruang (S3.P9.3.K3.1.IKK.e)		50%	100%									
	2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80 %							4.9						
		a. Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan selesai 100% (S3.P9.3.K3.2.IKK.a)		100%	100%	100%	100%							
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (K4)								6.20	6.5	7	7.5	8	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas							6.3					
		a. Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun (S3.P9.4.K4.1.IKK.a)	10 KLHS	100 KLHS	100 KLHS	100 KLHS	100 KLHS						
		b. Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun (S3.P9.4.K4.1.IKK.b)	10 KLHS	100 KLHS	100 KLHS	100 KLHS	100 KLHS						
	2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN /RPJMD												
		a. Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional) (S3.P9.4.K4.2.IKK.a)	1 RPPLH 2015-2019 Nasional	-	1 laporan Midterm Review RPPLH Nas	-	1 RPPLH 2020-2024 Nasional						
		b. Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Provinsi) (S3.P9.4.K4.2.IKK.b)	2 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Jawa	6 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Sumatera dan 4 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Jawa	5 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Kalimantan dan 3 RPPLH Provinsi pada Ekoregion	6 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Sulawesi	7 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Maluku, Papua dan Bali-Nusra						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab		
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		c. Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)(S3.P9.4.K4.2.IKK.c)		10 RPPLH Kab/Kota pada Ekoregion Jawa	5 RPPLH Kab/Kota pada Ekoregion Jawa dan 5 RPPLH Kab/Kota pada Ekoregion Bali-Nusra	10 RPPLH Kab/Kota pada Ekoregion Kalimantan	10 RPPLH Kab/Kota pada Ekoregion Sulawesi								
		d. Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada 6 ekoregion (S3.P9.4.K4.2.IKK.d)		6 ekoregion (update)	6 ekoregion (update)	6 ekoregion (update)	6 ekoregion (update)								
		e. Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000 (S3.P9.4.K4.2.IKK.e)		9 satuan peta ekoregion sulawesi	12 satuan peta ekoregion Jawa dan 27 satuan peta Bali Nusra	5 satuan peta ekoreg Maluku dan 50 satuan peta ekoreg Papua	51 satuan peta ekoregion Sumatera dan 51 satuan peta Kalimantan								
	3.Tersusunya neraca SDA LH Prov/Kab/Kot dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDB Hijau														
		Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau (S3.P9.K4.3.IKK.a)	1 Neraca SDALH dan PDRB Hijau provinsi pada ekoregion Jawa	10 Neraca SDALH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Jawa	10 Neraca SDALH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Kalimantan	10 Neraca SDALH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Sumatera	10 Neraca SDALH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Sumatera								
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (K5)								6	7	7.5	8	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	1. Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan							6						
		a. Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100%) (S3.P9.K5.IKK.a)		100%	100%	100%	100%							
		b. Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100%) (S3.P9.K5.IKK.b)		100%	100%	100%	100%							
		c. Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah) (S3.P9.K5.IKK.c)		60 KPA dan 20 LPJP	150 KPA dan 40 LPJP	200 KPA dan 50 LPJP	250 KPA dan 150 LPJP							
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (K6)								100,35	43,7	11,5	12,1	11,6	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019							43.7						
		a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point) (S3.P9.K6.IKK.a)		73 Poin	75 Poin	77 Poin	78 Poin							
Pemantapan Kawasan Hutan (K7)								326.52	355.7	394.7	414.2	397.4	Balai Pemantapan Kawasan Hutan	
	1. Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan							355.7						
		a. Penataan Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km (S3.P9.3.K7.IKK.a)		8.000 Km	8.000 Km	10.000 Km	8.000 Km							
		b. Jumlah KPH yang memiliki Rencana Pengelolaan 409 KPH (S3.P9.3.K6.IKK.b)		100 KPH	100 KPH	100 KPH	0 KPH							
		c. Jumlah kluster yang telah diinventarisasi Sumber Daya Hutan-nya sebanyak 1650 Kluster (S3.P9.3.K6.IKK.c)		330 Kluster	330 Kluster	330 Kluster	330 Kluster							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)		126,009,571						126.01	212.10	619.17	494.24	359.91	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Meningkatnya kualitas udara (S1.P10.1)												
		Indeks Kualitas Udara minimal 84											
	Meningkatnya kualitas air (S1.P10.2)												
		Indeks kualitas Air minimal 55											
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan (S1.P10.3)												
		Indeks Tutupan Lahan minimal 62											
	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (S3.P10.1)												
		Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun											
Pengendalian Pencemaran Udara (K1)		Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut (S3.P10.2)											
		Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun											
								25.28	88.00	194.00	119.00	126.00	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Udara
	1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014		3%	7%	10%	13%	15%		88.00	194.00	119.00	126.00	-

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		a. Persentase Penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15 % dari basis data 2014 (S1.P10.K1.IKK.a)	3%	7%	10%	13%	15%							
		b. Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota (S1.P10.K1.IKK.b)	-	9 kota	12 kota	12 kota	12 kota							
		c. Jumlah Kota yang menerapkan "green transportation" sebanyak 45 kota (S1.P10.K1.IKK.c)	3 kota	3 kota	19 kota	11 kota	12 kota							
		d. Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 Kota yang dipantau) (S1.P10.K1.IKK.d)	3 kota	9 kota	18 kota	27 kota	36 kota							
Pengendalian Pencemaran Air (K2)								25.50	40.25	96.25	116.00	47.00	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	
	1. Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124-950,73 ton BODe)			5%	20%	25%	30%		40.25	96.25	116.00	47.00		
		a. Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu (S1.P10.K2.IKK.a)	-	5 sungai	8 sungai	15 sungai	15 sungai							
		b. Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya (S1.P10.K2.IKK.b)	-	3 sungai	6 sungai	3 sungai	3 sungai							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		c. Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli) (S1.P10.K2.IKK.c)	-	6 sungai	9 sungai	12 sungai	15 sungai							
		d. Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar (S1.P10.K2.IKK.d)	1%	5%	10%	13%	16%							
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (K3)								25.25	25.25	217.00	140.50	41.00	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	
	1. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015			5%	10%	15%	20%		25.25	217.00	140.50	41.00		
		a. Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun (S1.P10.1.K3.1.IKK.a)	1 Kawasan pesisir (NCICD)	1 Kawasan pesisir (NCICD)	2 Kawasan pesisir (NCICD dan Semarang)	3 Kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Benoa-Bali)	3 Kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Benoa-Bali)							
		b. Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit (S1.P10.1.K3.1.IKK.b)		2 unit	16 unit	20 unit	-							
	2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	c. Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang (S1.P10.1.K3.2.IKK.a)	3 kawasan	10 kawasan	40 kawasan	60 kawasan	85 kawasan							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (K4)								17.16	17.00	47.00	44.00	42.00	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
	1. Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir			10%	15%	20%	25%		17.00	47.00	44.00	42.00	
		a. Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access) (S1.P10.K4.IKK.a)	3 provinsi	3 provinsi	11 provinsi	11 provinsi	update						
		b. Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014 (S1.P10.K4.IKK.b)	5%	10%	15%	20%	25%						
Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut (K5)								27.00	31.90	54.25	63.00	91.00	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
	1. Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan		75 ha	200 ha	300 ha	500 ha		31.90	54.25	63.00	91.00		
		a. Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologi gambutnya (S1.P10.2.K5.IKK.a)	3 KHG	173 KHG	353 KHG	504 KHG							
		b. Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung (S1.P10.2.K5.IKK.b)	3 KHG	173 KHG	353 KHG	504 KHG							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		c. Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun (S1.P10.2.K5.IKK.c)		3 KHG	173 KHG	353 KHG	504 KHG							
		d. Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) yang terpulihkan meningkat setiap tahun (S1.P10.2.K5.IKK.d)		100 ha	200 ha	300 ha	500 ha							
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)								4.82	9.70	10.67	11.74	12.91	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
	1. Tenujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH		71 Poin	73 Poin	75 Poin	77 Poin	78 Poin		9.70	10.67	11.74	12.91		
		a. SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P10.K6.IKK.a)	71 Poin	73 Poin	75 Poin	77 Poin	78 Poin							
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (P11)		133,290,342						133.29	405.70	126.10	132.60	127.20	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya risiko akibat paparan B3, limbah B3 dan sampah (S1.P11)													
		Jumlah sampah yang dikelola sebesar 124,6 juta ton di 380 kota												
		Jumlah bahan berbahaya dan beracun yang dikelola sebesar 3 juta ton dalam 5 tahun												
		Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikelola sebesar 755.595.000 ton dalam 5 tahun												
Pengelolaan Sampah (K1)								40,00	207,60	27,50	28,70	27,70	Direktorat Pengelolaan Sampah	
	1. Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya sebesar 20% dari 124,6 juta ton atau sebesar 24,5 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota			6,23 Juta Ton	12,46 Juta ton	18,68 Juta Ton	24,5 Juta Ton		192,10					
		a. Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui penerapan EPR sebesar 85 ton dalam 5 tahun (S1.P11.K1.1.IKK.a)		30	51	68	85							
		b. Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 20 ton/hari sebesar 124.100 ton dalam 5 tahun -- > 2 unit (S1.P11.K1.1.IKK.b)		-	1,839,510	1,912,510	1,985,510							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		c. Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 10 ton/hari sebesar 131.400 ton dalam 5 tahun -- > 4 unit (S1.P11.K1.1.IKK.c)		1,766,510	1,821,260	1,876,010	1,930,760						
		d. Pengurangan jumlah timbulan sampah melalui bank sampah kapasitas 1 ton/hari sebesar 113.150 ton dalam 5 tahun --> 50 unit (S1.P11.K1.1.IKK.d)		705,250	1,070,250	1,435,250	1,800,250						
		e. Jumlah kota berwawasan lingkungan berbasis 3 R sebagai destinasi wisata sebanyak 20 kota (S1.P11.K1.1.IKK.e)		5 kota	10 kota	15 kota	20 kota						
	2. Tertanganinya jumlah sampah sebesar 75% dari 124,6 juta ton atau sebesar 97,8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota			37,38 Juta Ton	49,84 Juta ton	74,76 Juta Ton	97,8 Juta Ton		15,50				
		a. Jumlah sampah tertangani di 380 kota melalui pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh, dan sehat berkelanjutan (S1.P11.K1.2.IKK.a)		15,547,947	16,700,469	17,874,487	19,070,316						
		b. Jumlah sampah yang tertangani melalui kegiatan komposting yang terpadu dengan pertanian perkotaan kapasitas 0,5 ton/hari --> 6 lokasi (S1.P11.K1.2.IKK.b)		402	767	1,132	1,497						
		c. Jumlah timbulan sampah yang dikelola menjadi energi terburukan di 380 kota (S1.P11.K1.2.IKK.c)		365,000	730,000	1,095,000	1,460,000						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		d. Jumlah kota yang membangun urban farming sebanyak 100 kota (S1.P11.K1.2.IKK.d)		40 kota	60 kota	80 kota	100 kota							
		e. Persentase produksi biomassa dari industri sebagai sumber energi sebesar 80% (S1.P11.K1.2.IKK.e)		20 %	40 %	60 %	80 %							
Pengelolaan B3 (K2)								26.00	15.90	22.20	23.00	22.20	Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun	
	1. Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 sebesar 100%			100%	100%	100%	100%		15.90					
		a. Persentase jumlah dan jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 % (S1.P11.K2.1.IKK.a)		100%	100%	100%	100%							
		b. Presentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 % (S1.P11.K2.1.IKK.b)		100%	100%	100%	100%							
	2. Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan menjadi 100%			40%	60%	80%	100%							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya meningkat setiap tahun (S1.P11.K2.2.IKK.a)		40%	60%	80%	100%						
		b. Jumlah Jenis B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya (S1.P11.K2.2.IKK.b)		2 jenis B3	2 jenis B3	2 jenis B3	2 jenis B3						
		c. Jumlah Jenis B3 yang dihapuskan (S1.P11.K2.2.IKK.c)		2 jenis B3	2 jenis B3	2 jenis B3	2 jenis B3						
Kegiatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, dan Limbah non B3 (K3)								15.50	15.60	19.00	20.80	19.10	Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
	1. Meningkatnya penetapan limbah B3 dan limbah non B3 melalui kegiatan pelayanan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 menjadi 100%			100%	100%	100%	100%		15.60				
		a. Persentase layanan perizinan pengumpulan limbah B3 nasional 100% (S1.P11.K3.1.IKK.a)		100%	100%	100%	100%						
		b. Persentase layanan perizinan pengangkutan limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.b)		100%	100%	100%	100%						
		c. Persentase layanan perizinan pemanfaatan limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.c)		100%	100%	100%	100%						
		d. Persentase layanan usaha pengolahan limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.d)		100%	100%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		e. Persentase layanan perizinan penimbunan limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.e)		100%	100%	100%	100%							
		f. Persentase layanan perizinan dumping limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.f)		100%	100%	100%	100%							
		g. Persentase layanan perizinan ekspor limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.g)		100%	100%	100%	100%							
		h. Persentase layanan perizinan impor limbah Non B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.h)		100%	100%	100%	100%							
		i. Persentase layanan penetapan status limbah B3 dan limbah Non B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.i)		100%	100%	100%	100%							
		j. Persentase penanganan kegiatan limbah lintas batas ilegal dan pembuangan limbah B3 ke laut ilegal (S1.P11.K3.1.IKK.j)		100%	100%	100%	100%							
	2. Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 dan limbah non B3 yang dikelola sebagai sumber daya sebesar 30% melalui fasilitasi			32,1 juta ton	34,3 juta ton	36,7 juta ton	39,7 juta ton							
		a. Volume dan jenis limbah yang dimanfaatkan sebagai sumber daya meningkat setiap tahun (S1.P11.K3.2.IKK.a)		32,1 juta ton	34,3 juta ton	36,7 juta ton	39,7 juta ton							
Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (K4)								15.50	50.70	26.60	27.70	26.80	Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	1. Meningkatnya jumlah limbah B3 dan Limbah Non B3 yang dipantau pengelolannya			156,1 Juta Ton	156,1 Juta Ton	156,1 Juta Ton	156,1 Juta Ton		50.70					
		a. Persentase peningkatan limbah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional sebesar 100% dari baseline 2014 (S1.P11.K4.1.IKK.a)		100%	100%	100%	100%							
		b. Jumlah limbah B3 yang dikelola sebesar 80% dari baseline 2014 (S1.P11.K4.1.IKK.b)		175 juta ton	175 juta ton	175 juta ton	175 juta ton							
		c. Jumlah limbah B3 cair dan padat (oli bekas dan sludge oil) yang dimanfaatkan mencapai 1,014,000 ton sebagai bahan bakar alternatif (setara penurunan emisi Gas rumah kaca sebesar 121 ribu ton CO2e/tahun) (S1.P11.K4.1.IKK.c)		1,1 juta ton	1,1 juta ton	1,1 juta ton	1,1 juta ton							
Kegiatan Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 (K5)								26.00	99.10	26.00	27.30	26.10	Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3	
	1. Meningkatnya Volume lahan terkontaminasi yang terpulihkan			91.000 Ton	120 ribu Ton	130 ribu Ton	140 ribu Ton		99.10					
		a. Sistem dan mekanisme inventarisasi dan identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3 tersedia (S1.P11.K5.1.IKK.a)		100%	-	-	-							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		b. Lahan terkontaminasi limbah B3 terinventarisasi dan teridentifikasi setiap tahun (S1.P11.K5.IKK.b)		Inventarisasi dan Identifikasi lahan terkontaminasi di Sumatera (1 ekoregion)	Inventarisasi dan Identifikasi lahan terkontaminasi di Kalimantan (1 ekoregion)	Inventarisasi dan Identifikasi lahan terkontaminasi di Sulawesi dan Maluku (2 ekoregion)	Inventarisasi dan Identifikasi lahan terkontaminasi di Papua (1 ekoregion)							
		c. Lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan oleh penanggung jawab Usaha /kegiatan meningkat setiap tahun (S1.P11.K5.IKK.c)		90.000 ton	100.000 ton	110.000 ton	110.000 ton							
		d. Lahan terkontaminasi limbah B3 yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun (S1.P11.K5.IKK.b)		4500 ton	20.000 ton	20.000 ton	30.000 ton							
		e. Sistem dan mekanisme tanggap darurat Limbah B3 tersedia dan beroperasi (S1.P11.K5.IKK.c)		100%	100%	100%	100%							
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (K6)								10,29	16,80	4,80	5,10	5,30	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Sampah, Limbah dan B3			72	74	76	78		16,80					
		a. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (S1.P11.K6.IKK.a)		72	74	76	78							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P12)								63,63	40,40	43,71	48,09	52,89	Inspektorat Jenderal
	Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK (S3.P12)												
		a. Tingkat Kapabilitas APIP KLHK	1	2	2	3	3						
		b. Tingkat Kematangan Implementasi SPPP	1	2	2	3	3						
		c. Instansi KLHK yang Akuntabel (Skor LAKIP)	B	B	B	A	A						
Pengawasan yang Profesional guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I (K1)								3,54	4,90	5,39	5,93	6,52	Inspektorat Wilayah I
	1. Pengawasan internal yang berkualitas								0,40	0,44	0,48	0,53	
		a. Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K1.1.IKK.a)	3	3	3	3	3						
	2. Mempertahankan opini WTP								4,10	4,51	4,96	5,46	
		a. Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K1.2.IKK.a)	Rp 3,1 M										
	3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP								0,40	0,44	0,48	0,53	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		a. Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K1.3.IKK.a)	70 poin	72	74	76	78							
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II (K2)								3.60	4.90	5.39	5.93	6.52	Inspektorat Wilayah II	
	1. Pengawasan internal yang berkualitas								0.40	0.44	0.48	0.53		
		a. Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K2.1.IKK.a)	3	3	3	3	3							
	2. Mempertahankan opini WTP								4.10	4.51	4.96	5.46		
		a. Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K2.2.IKK.a)	Rp 3,1 M											
	3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP								0.40	0.44	0.48	0.53		
		a. Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K2.3.IKK.a)	70 poin	72	74	76	78							
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III (K3)								3.76	4.95	5.45	5.99	6.59	Inspektorat Wilayah III	
	1. Pengawasan internal yang berkualitas								0.45	0.50	0.54	0.60		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K3.1.IKK.a)	3	3	3	3	3						
	2. Mempertahankan opini WTP								4.10	4.51	4.96	5.46	
		a. Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K3.2.IKK.a)	Rp 3,1 M										
	3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP								0.40	0.44	0.48	0.53	
		a. Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K3.3.IKK.a)	70 poin	72	74	76	78						
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV (K4)								3.99	2.92	3.21	3.53	3.89	Inspektorat Wilayah IV
	1. Pengawasan internal yang berkualitas								0.50	0.55	0.61	0.67	
		a. Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K4.1.IKK.a)	3	3	3	3	3						
	2. Mempertahankan opini WTP								1.71	1.88	2.07	2.28	
		a. Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K4.2.IKK.a)	Rp 3,1 M										

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP							0.71	0.78	0.86	0.95		
		a. Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K4.3.IKK.a)	70 poin	72	74	76	78						
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN (K5)								2.92	21.33	22.94	25.23	27.75	Inspektorat Investigasi
	1. Pengawasan kasus yang berindikasi KKN							0.58	0.64	0.70	0.77		
		a. Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif (S3.P12.K5.1.IKK.a)	20 kasus										
	2. Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas)							18.09	19.37	21.31	23.44		
		a. Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan (S3.P12.K5.2.IKK.a)	20 Dumas										
	3. Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (WBK)							2.66	2.93	3.22	3.54		
		a. Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 satker/tahun) (S3.P12.K5.3.IKK.a)	3 rekom										
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK (K6)								45.83	1.40	1.34	1.48	1.62	
	1. Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal							0.18	-	-	-		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Jumlah Rekomendasi hasil audit internal yang ditindaklanjuti secara tuntas (S3.P12.K6.1.IKK.a)	2.500 saran	3000 saran	3500 saran	4000 saran	4500 saran						
	2. Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup KLHK							1.22	1.34	1.48	1.62		
		a. Nilai Tingkat kematangan implementasi SPIP (S3.P12.K6.2.IKK.a)	1	2	2	3	3						
	3. Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen												
		a. Nilai Implementasi SAKIP Itjen (S3.P12.K6.3.IKK.a)	70	72	74	76	78						
		b. Nilai Tingkat kapabilitas APIP (S3.P12.K6.3.IKK.c)	1	2	2	3	3						
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (P13)		1,120,316,835						1120.316835	822.67	995.74	1,141.94	1,292.14	Sekretariat Jenderal
	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (S3.P13)	1,120											
		a. Keterbukaan Informasi dan komunikasi publik meningkat setiap tahun											
		b. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan meningkat setiap tahun											
		c. Kapasitas Birokrasi melalui Reformasi Birokrasi											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		d. Kualitas Pelayanan Publik Meningkat setiap Tahun												
		e. Nilai SAKIP KLHK Minimal A (minimal 78 poin)	70 poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin							
Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK (K1)								18.59	18.57	19.47	22.55	25.85	Biro Hubungan Masyarakat	
	1. Tercapainya penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan													
		a. Jumlah media massa yang bekerja sama dengan Kementerian LHK dalam rangka <i>Awareness Campaign</i> sebanyak 20 media massa (S3.P13.K1.1.IKK.a)	10 media massa	12 media massa	15 media massa	18 media massa	20 media massa							
		b. Jumlah publikasi proses perencanaan anggaran Kementerian LHK kepada masyarakat (S3.P13.K1.1.IKK.b)	1 publikasi											
		c. Jumlah publikasi penggunaan anggaran Kementerian LHK (S3.P13.K1.1.IKK.c)	12 kali											
		d. Jumlah pemberitaan positif bidang LHK di media massa sebanyak 3.000 pemberitaan setiap tahun (S3.P13.K1.1.IKK.d)	3.000 Pemberitaan											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		e. Layanan PPID berdasarkan penilaian KIP (Komisi Informasi Publik) meningkat 200 poin atau 40 poin setiap tahun atau (baseline tahun 2013 untuk eks KLH 650) (S3.P13.K1.1.IKK.e)	40 poin											
Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK (K2)								14.00	15.00	15.89	18.28	21.02	Pusat Data dan Informasi	
	1. Termanfaatkannya Informasi Kualitas Lingkungan Hidup untuk pengukuran kinerja KLHK dan pengambilan kebijakan								4.46	3.78	4.34	4.99		
		a. Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional setiap tahun diperbaharui dan disebarluaskan (S3.P13.K2.1.IKK.a)	1 IKLH											
		b. Jumlah daerah yang difasilitasi pembentukan Sistem informasi LHK Daerah (SIL LHKD) (S3.P13.K2.1.IKK.b)	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah	15 Daerah	15 Daerah							
		c. Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tersedia setiap tahun (S3.P13.K2.1.IKK.c)	1 SLHI											
	2. Tercapainya peningkatan kapasitas layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LHK								10.54	12.12	13.93	16.02		
		a. Jumlah sistem informasi KLHK yang terbangun dan beroperasi (S3.P13.K2.2.IKK.a)	1 sistem											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		b. Jumlah satker yang memiliki struktur jaringan dan teknologi informasi berfungsi memenuhi standar minimal (S3.P13.K2.2.IKK.b)	280 satker											
Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi (K3)								351.32	422.63	486.02	558.93	642.76	Biro Perencanaan	
	1. Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK								418.36	481.12	553.28	636.27		
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95% (S3.P13.K3.1.IKK.a)	90%	91%	92%	93%	95%							
		b. Nilai SAKIP KLHK Minimal A (minimal 78 poin) (S3.P13.K3.1.IKK.b)	70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 poin							
		c. Mekanisme pengelolaan dan penyaluran pendanaan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (S3.P13.K3.1.IKK.c)	1 mekanisme terbentuk	10 % dana tersalurkan	40 % dana tersalurkan	60 % dana tersalurkan	95 % dana tersalurkan							
Penyelenggaraan Kebijakan Strategis bidang lingkungan hidup dan kehutanan (K4)	2. Tersedianya rancangan kebijakan strategis bidang lingkungan hidup dan kehutanan							-	4.27	4.91	5.64	6.49	Pusat Kebijakan Strategis	
		a. Jumlah rancangan kebijakan strategis (S3.P13.K4.2.IKK.a)	11 rancangan											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Penyelenggaraan Ketausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK (K5)								402.90	179.50	206.43	237.39	273.00	Biro Umum
	1. Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK								179.50	206.43	237.39	273.00	
		Jumlah manajemen aset (S3.P13.K5.1.IKK.a)	400 satker										
Kegiatan penyelenggaraan keteknikan lingkungan hidup dan kehutanan (K6)	Terselenggaranya pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan teknis kehutanan dan lingkungan efektivitas dan efisien	a. Jumlah satker yang memiliki NSPK baru/hasil evaluasi (S3.P13.K6.1.IKK.a)		112 Satker	168 Satker	224 Satker	280 satker	0.30					Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		b. Jumlah satker yang memiliki sarana dan peralatan LHK terdistribusi di 280 satker dan berfungsi baik sesuai NSPK (S3.P13.K6.1.IKK.b)		112 Satker	168 Satker	224 Satker	280 satker						
Pembiayaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K7)								100.84	30.64	38.30	49.78	54.76	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
	1. Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir minimal sebesar 2 T untuk mitra pembangunan hutan pada KPH dan non KPH (HKm, HD, HR dan Hutan Tanaman) serta investasi lingkungan								30.64	38.30	49.78	54.76	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		a. Jumlah dana yang terdistribusi kepada mitra kerja KPH dan non KPH (HKM, HD, HR, dan hutan tanaman rakyat) serta investasi lingkungan sebesar Rp. 2 T (S3.P13.K7.1.IKK.a)	Rp0,4 T											
		b. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Pendapatan BLU Pusat P2H (S3.P13.K7.1.IKK.b)	Rp114 M	Rp114 M	Rp110 M	Rp104 M	Rp83,2 M							
Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri (K8)								12.59	10.59	12.18	14.01	16.11	Biro Kerjasama Luar Negeri	
	1. Meningkatnya kerja sama luar negeri bidang lingkungan hidup dan kehutanan								10.59	12.18	14.01	16.11		
		a. Jumlah kerja sama baru Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebanyak 30 kerja sama (S3.P13.K8.1.IKK.a)	6 kerja sama											
		b. Seluruh kerja sama Luar Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah terlaksana sesuai dengan kepentingan nasional (S3.P13.K8.1.IKK.b)	23 kerja sama	25 kerja sama	27 kerja sama	29 kerja sama	31 kerja sama							
		c. Pemanfaatan dana <i>Global Environmental Fund (GEF)</i> meningkat setiap tahun (S3.P13.K8.1.IKK.c)	\$US10 juta	\$US20 juta	\$US40 juta	\$US60 juta	\$US89 juta							

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Pengendalian Ekoregion Jawa (K9)								23.19	17.88	32.00	32.50	32.50	Pusat Pengendalian Ekoregion Jawa
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Jawa		80%	85%	90%	90%	95%		17.88	32.00	32.50	32.50	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Jawa 95% (S3.P13.K9.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%						
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Jawa selama 5 tahun (S3.P13.K9.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik						
Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra (K10)								16.71	10.56	18.00	19.25	20.50	Pusat Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Bali Nusra		80%	85%	90%	90%	95%		10.56	18.00	19.25	20.50	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali Nusra 95% (S3.P13.K10.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Bali-Husra selama 5 tahun (S3.P13.K10.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik							
Pengendalian Ekoregion Kalimantan (K11)								19.89	15.29	33.00	38.00	43.00	Pusat Pengendalian Ekoregion Kalimantan	
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Kalimantan		80%	85%	90%	90%	95%		15.29	33.00	38.00	43.00		
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan 95% (S3.P13.K11.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%							
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Kalimantan selama 5 tahun (S3.P13.K11.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik							
Pengendalian Ekoregion Sulawesi (K12)								21.64	12.60	22.00	25.50	22.50	Pusat Pengendalian Ekoregion Sulawesi-Maluku	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Sulawesi		80%	85%	90%	90%	95%		12.60	22.00	25.50	22.50	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Sulawesi 95% (S3.P13.K13.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%						
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Sulawesi selama 5 tahun (S3.P13.K12.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik						
Pengendalian Ekoregion Maluku (K13)									2.81	4.50	6.00	7.50	
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Maluku		80%	85%	90%	90%	95%		2.81	4.50	6.00	7.50	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Maluku 95% (S3.P13.K13.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Maluku selama 5 tahun (S3.P13.K13.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik							
Pengendalian Ekoregion Papua (K14)								11.83	7.64	12.00	12.25	12.50	Pusat Pengendalian Ekoregion Papua	
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Papua		80%	85%	90%	90%	95%		7.64	12.00	12.25	12.50		
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua 95% (S3.P13.K14.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%							
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Papua selama 5 tahun (S3.P13.K14.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik							
Pengendalian Ekoregion Sumatera (K15)								27.92	20.37	28.56	30.00	31.00	Pusat Pengendalian Ekoregion Sumatera	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Sumatera		80%	85%	90%	90%	95%		20.37	28.56	30.00	31.00	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Sumatera 95% (S3.P13.K15.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%						
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Sumatera selama 5 tahun (S3.P13.K15.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik						
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK (K16)								52.81	19.18	22.05	25.36	29.17	Biro Keuangan
	1. Meningkatnya administrasi keuangan KLHK secara efektif								19.18	22.05	25.36	29.17	
		a. Opini WTP untuk Laporan Keuangan (S3.P13.K16.1.IKK.a)	1 opini WTP										
		b. Jumlah PNPB meningkat sebesar 10% dari penerimaan PNPB tahun 2013 (S3.P13.K16.1.IKK.b)	Rp3 T	Rp6 T	Rp9 T	Rp12 T	Rp15 T						
		c. Jumlah perusahaan yang menyelesaikan piutang negara di bidang LHK, 25 perusahaan (S3.P13.K16.1.IKK.c)	5 perusahaan										

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Tersedianya regulasi dengan prioritas mendorong hasil produksi dan nilai ekspor hasil hutan (kayu, HHBK, TSL), HKM, HD, HK, HTR, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), perubahan iklim dan kebijakan LHK lainnya												
		a. Jumlah naskah akademik dan RUU terkait dengan perjanjian bidang lingkungan hidup dan kehutanan (S3.P13.K19.1.IKK.a)		1 RUU									
		b. Jumlah rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU dan revisi PP (S3.P13.K19.IKK.b)		10 RPP dan PP									
		c. Jumlah rancangan Peraturan Menteri turunan PP yang difasilitasi penelaahan, penulisan, dan penerbitannya (S3.P13.K19.1.IKK.c)		10 Rpermen	10 Rpermen	10 Rpermen	10 Rpermen						
		d. Jumlah RPERPRES, RKEPPRES, RUIPRES, RKepMen, RPerDa Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S3.P13.K19.1.IKK.d)		10 Rancangan Peraturan Perundangan									
	2. Penanganan bantuan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan												
		a. Terelesainya perkara perdata, TUN, uji materi dan pendampingan perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan (S3.P13.K19.2.IKK.a)		80% putusan perkara menang									
	3.											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
TOTAL								6,667.84	6,415.47	6,263.72	6,932.82	7,664.20	

Jakarta,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

SITI NURBAYA